Perry Warjiyo Terapkan Sistem Meritokrasi di Bank Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, akan mengedepankan sistem meritokrasi di kantor dan pegawainya. Hal tersebut merupakan salah satu strategi BI untuk melakukan reformasi kelembagaan untuk penguatan profesionalitas, tata kelola yang baik dan sekaligus sebagai implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Beberapa langkah untuk melakukan reformasi kelembagaan, kata Perry diantaranya adalah dengan menyempurnakan laporan kelembagaan triwulanan, termasuk kinerja BI, gubernur, dan anggota dewan gubernur BI. "Reklasifikasi anggaran kebijakan dan anggaran operasional, persiapan untuk persetujuan penggunaan cadangan tujuan dan implikasinya, serta pembahasan dengan BSBI untuk proses evaluasi kinerja kelembagaan BI," jelas Perry saat melakukan pemaparan di Komisi XI DPR, Senin (20/3/2023). Adapun untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), kata Perry, pihaknya akan memperkuat kepemimpinan BI dan budaya kerjanya dengan mengusung asas meritokrasi. Pun, Perry pun mengapresiasi kepada Komisi XI DPR karena telah memilih Filianingsih Hendarta sebagai Deputi Gubernur BI, untuk menggantikan posisi Dody Budi Waluyo yang akan memasuki masa purnabakti atau pensiun pada April 2023. "Kami akan memperkuat kepemimpinan BI dan budaya kerja, adalah dasarnya meritokrasi," jelas Perry. "Berterima kasih kepada Komisi XI dengan memperkuat dewan gubernur dengan terpilihnya Bu Filianingsih. Ini dukungan kami komitmen di BI adalah meritokrasi sangat penting, tidak melihat suku dan bangsa," kata Perry lagi. Seperti diketahui istilah meritokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Young M (1958) dalam 'The Rise of the Meritocracy'. Meritokrasi adalah suatu sistem sosial, di mana hasil seperti kekayaan, pekerjaan, dan kekuasaan diperoleh berdasarkan prestasi, yaitu kecerdasan dan usaha. Beberapa studi memaknai meritokrasi sebagai kondisi yang menghadirkan kesempatan yang sama kepada semua individu dalam masyarakat untuk menduduki suatu posisi atau jabatan di publik. "Sehingga jajaran dewan gubernur di BI ada tiga wanita dan tiga laki-laki. Ini bentuk komitmen kami, kebijakan BI yang terbaik adalah yang memimpin bangsa ini," jelas Perry.